

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, informal dan nonformal. Khusus pendidikan nonformal sebagai salah satu jalur pendidikan bertanggung jawab dalam mencerdaskan dan mengembangkan Negara ini supaya siap menghadapi masa depan yang penuh persaingan.

Pendidikan nonformal memiliki banyak program, diantaranya adalah Program Paket B dan merupakan program yang menunjang program dasar. Program ini dikembangkan setara dengan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) yang keberadaannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 pasal 18 ayat 3 yang menetapkan bahwa kelompok belajar paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan Sekolah Lanjutan Pertama juga sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0131/U/1994, Tahun 1994 tentang Program Paket B dan Paket A. yang merupakan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan Presiden pada tanggal 2 Mei Tahun 1994.

Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah yang mengedepankan Pelayanan Pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat maka pemerintah melalui Dinas yang terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional khususnya yang ada di Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Botupingge termasuk target

dari Pemerintah Daerah karena menurut hasil survey bahwa masih banyak warga belajar yang Putus Sekolah bahkan ada yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah meskipun hanya sampai Sekolah Dasar.

Salah satu alternative untuk mewujudkan maksud dan tujuan pemerintah dalam memberikan pendidikan yang layak dan merata bagi semua warga belajar maka diperlukan pelaksanaan system pembelajaran Paket B yang lebih mantap sesuai dengan kurikulum yang berlaku yang diterapkan secara bersama-sama pada warga belajar paket B.

Dalam Buku Petunjuk Teknis Panduan Pelaksanaan Bantuan Pendidikan lanjutan Program Paket B Tahun 2012 dalam bentuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) antara lain :

- a. Latar belakang Program Paket B merupakan salah satu alternative layanan pendidikan dasar yang diperuntukkan bagi masyarakat yang dalam kenyataannya program ini masih perlu ditingkatkan mutu proses dan hasil pembelajarannya.
- b. Dalam rangka upaya peningkatan mutu dimaksud, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui Program Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan dan Subsidi peningkatan mutu SMP dan peserta didik yang mengikuti program Paket B Tahun 2012 akan diberikan Dana Tambahan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B melalui Dana Dekonsentrasi, bagi penyelenggara Program Paket B yang memenuhi syarat.

- c. Maksud dan tujuan memberikan pedoman dalam pengelolaan dan bantuan pendidikan lanjutan Program Paket B diatas agar mencapai hasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah

Salah satu jenis pendidikan luar sekolah yang berupaya memberikan pengetahuan yang relative serupa dengan pengetahuan yang diperoleh setara SLTP adalah adanya kelompok-kelompok belajar, Paket A, B dan C.

Program paket A, B dan C ini dilaksanakan atau dikelola oleh pemerintah atau masyarakat. Pelaksanaannya baik oleh kelompok – kelompok belajar ataupun oleh sanggar – sanggar belajar, oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun oleh Sanggar Kegiatan belajar (SKB).

Khusus di Kecamatan Botupingge pada saat ini telah dikembangkan dan dilaksanakan Program Paket B setara SLTP, tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala terutama dari Sikap Warga belajar itu sendiri.

Banyak faktor yang mempengaruhi program tersebut, antara lain minat Warga Belajar terhadap pelaksanaan Program Paket B, Sikap Warga belajar, dukungan orangtua dan keluarga, dimana banyak warga belajar yang malas untuk sekolah karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, Sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja dan mencari nafkah daripada harus sekolah dan sebagainya, serta factor Sikap Warga Belajar itu sendiri, tetapi dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada perilaku masyarakat itu sendiri. Faktor Sikap Warga Belajar inilah yang sangat dominan dalam meningkatkan Pelaksanaan Program Paket B di Kecamatan Botupingge.

Namun yang perlu dipertanyakan apakah Sikap Warga Belajar memiliki Sikap yang positif atau negatif terhadap Pelaksanaan Program Paket B tersebut atau tidak, permasalahan ini muncul sebagai akibat dari adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa Warga Belajar di Kecamatan Botupingge kurang memiliki sikap positif terhadap program – program yang diberikan kepada mereka. Hal ini terlihat karena masih kurangnya minat warga belajar yang putus sekolah menerima program ini dan masih adanya Warga Belajar yang sudah mengikuti program ini tapi sering bolos untuk bersekolah dan sebagainya, berdasarkan data – data diatas asumsi yang ada bahwa Sikap Warga Belajar memiliki sikap negative terhadap Pelaksanaan Program Paket B di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango untuk itu penulis dalam penelitian ini merumuskan judul : “ **Sikap Warga Belajar Terhadap Pelaksanaan Program Paket B di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Program Paket B merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap Pendidikan Nasional untuk menampung Warga Belajar yang kurang mampu dan tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti system persekolahan tingkat pertama masih merupakan suatu masaalah yang perlu dipecahkan.

2. Program Paket B merupakan program pelayanan pendidikan luar sekolah dalam menyukseskan Program Wajib Belajar dalam menampung warga belajar yang putus sekolah dalam dan antar jenjang pendidikan dasar tersebut. Program Paket B ini diharapkan pelaksanaannya dapat menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang belum terwujud sesuai apa yang diharapkan.
3. Apakah dalam penyelenggaraan Program Paket B semua unsur dalam sistem Paket B sudah berjalan sesuai dengan peran masing – masing.
4. Bagaimana sikap warga belajar terhadap program paket B di Kecamatan Botupingge..

1.3 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah dan memperhatikan kemampuan dari segi relevansi ilmu pengetahuan yang diketahui, biaya dan waktu yang tersedia, untuk itu peneliti merumuskan masalah pada : “ Bagaimana Sikap Warga Belajar Terhadap Pelaksanaan Program Paket B di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui Sikap Warga Belajar terhadap pelaksanaan program Paket B di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rangsangan dalam pengembangan pendidikan khususnya pada Sikap Warga Belajar bagaimana pentingnya pendidikan di masa sekarang.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi atau Dinas yang terkait yaitu Dinas Pendidikan setempat untuk lebih memperhatikan keadaan Warga Belajar atau tempat yang masih minim pendidikannya.